



LAPORAN PPID

TAHUN
2023



BPSI TANAMAN SAYURAN

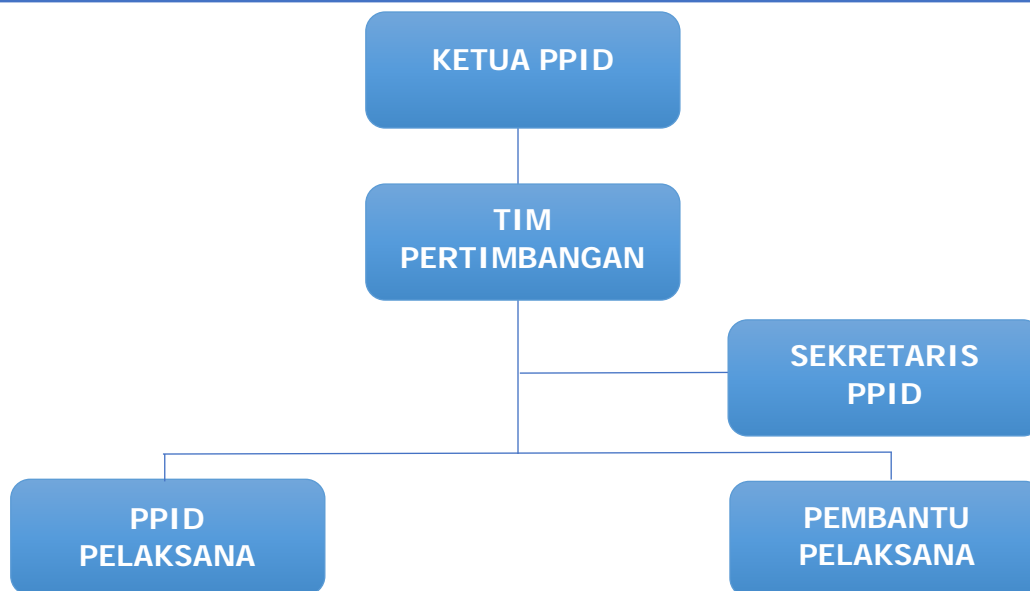
<https://sayuran.bsip.pertanian.go.id>

PENDAHULUAN

Sejak disahkannya UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerintah telah membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia. Definisi dari informasi publik menurut undang-undang ini adalah sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 dituntut pemahaman dari penanggungjawab informasi/humas di suatu lembaga pemerintahan, apakah informasi yang akan diberikan termasuk informasi yang dikecualikan atau yang wajib diberikan. PPID BPSI Tanaman Sayuran merupakan pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi kepada publik. BPSI Tanaman Sayuran telah menerbitkan keputusan No. 65/Kpts/OT.050/H.3.1/06/2023 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

BPSI Tanaman Sayuran melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia dan anggaran.

Dalam peraturan tersebut diatur mengenai struktur organisasi PPID pada BPSI Tanaman Sayuran beserta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan. Struktur PPID BPSI Tanaman Sayuran secara jelas digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur PPID BPSI Tanaman Sayuran

MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Moto Pelayanan

Pelayanan informasi publik di BPSI Tanaman Sayuran mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang Cepat, Akurat, Bersikap Ramah, Akuntabilitas, Informatif (CABAI), serta dengan cara yang sederhana.

Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, balai pengujian standar instrumen tanaman sayuran menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku."



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan surat keputusan No. 65/Kpts/OT.050/H.3.1/06/2023 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), tugas PPID BPSI Tanaman Sayuran :

I. PPID Pembantu Pelaksana:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana.

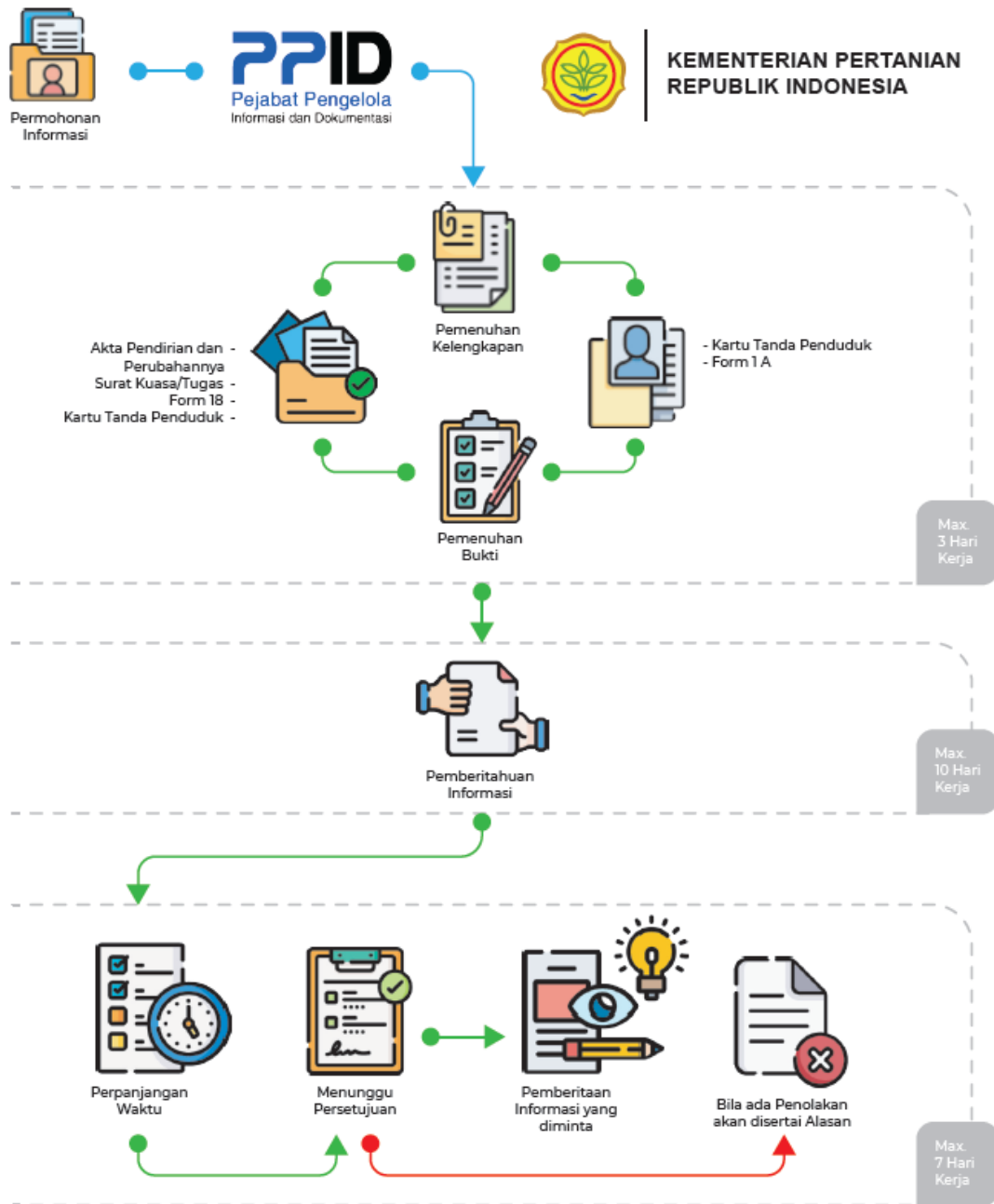
II. Petugas Harian PPID:

- a. Menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
- b. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
- c. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat.

Prosedur Permohonan Informasi Publik

Kementerian Pertanian telah mengatur prosedur memperoleh informasi publik dalam Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2012 yang dapat diakses melalui website atau Portal PPID BPSI Tanaman Sayuran (<https://balitsa-litbang-ppid.pertanian.go.id/>), maupun tersedia di Konter Layanan Informasi Publik di BPSI Tanaman Sayuran.

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



Gambar 2. Prosedur Permohonan Informasi Publik



Gambar 3. Alur Permohonan Informasi

Dukungan Anggaran Keterbukaan Informasi Publik

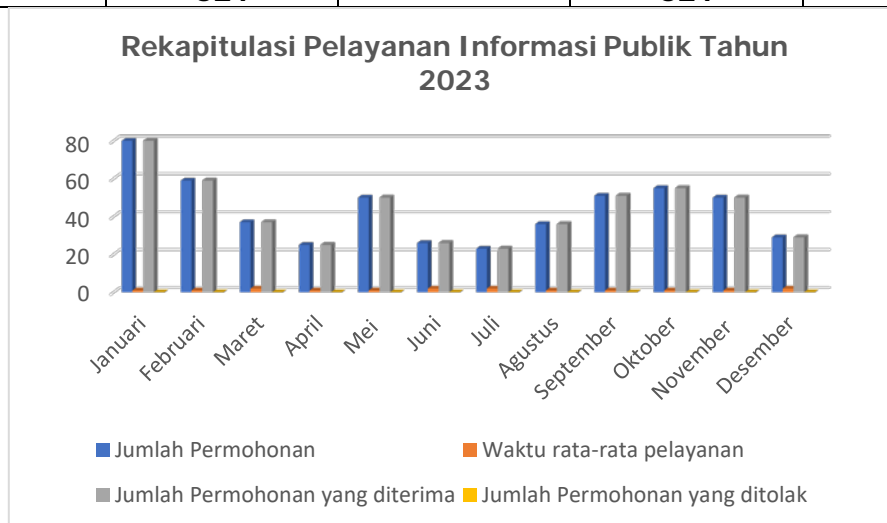
Anggaran pengelolaan Informasi Publik di BPSI Tanaman Sayuran berada dibawah layanan umum di Tata Usaha berjudul manajemen pengelolaan humas sebesar Rp 25.000.000,-.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Pada tahun 2023, penerimaan pelayanan informasi publik diberikan melalui dua layanan yakni secara langsung melalui desk layanan dengan mengisi form pelayanan informasi dan melalui portal PPID pada silayan. Dengan rincian sebanyak 521 informasi dipenuhi.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permohonan yang diterima	Jumlah Permohonan yang ditolak
Januari	80	1	80	0
Februari	59	1	59	0
Maret	37	2	37	0
April	25	1	25	0
Mei	50	1	50	0
Juni	26	2	26	0
Juli	23	2	23	0
Agustus	36	1	36	0
September	51	1	51	0
Oktober	55	1	55	0
November	50	1	50	0
Desember	29	2	29	0
Total	521		521	0



Gambar 4. Grafik Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

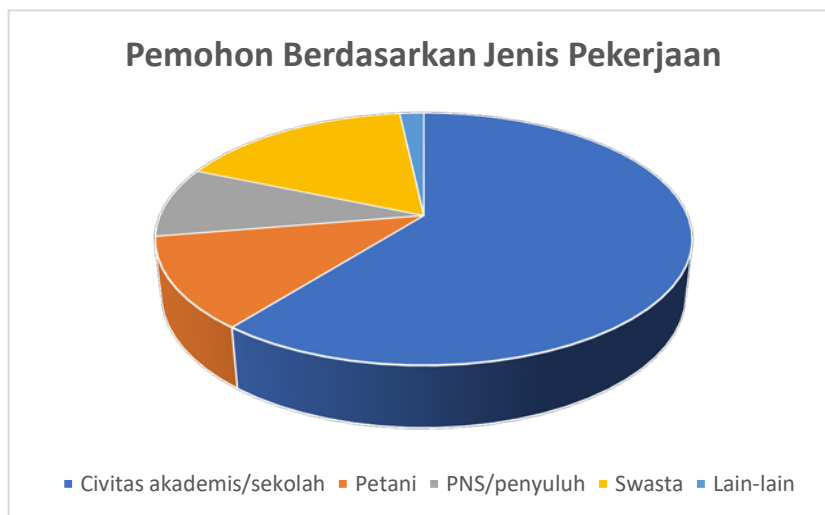
Berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi untuk kategori individu, permohonan informasi yang dilakukan oleh laki-laki sebanyak 278 orang dan perempuan sebanyak 243 orang.



Gambar 5. Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, permohonan informasi individu didominasi oleh Civitas akademis/sekolah sebanyak 316 orang, pegawai swasta sebanyak 88 orang, wiraswasta/lain-lain sebanyak 9 orang, PNS/penyuluh 47, petani 61 orang.



Gambar 7. Grafik Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Pengelompokkan

Permohonan informasi berdasarkan kategori pengelompokkan dengan rincian Kepegawaian 1, bimtek dan kerjasama 30, profil badan public 0, informasi teknologi 65, magang, PKL dan penelitian 113, kunjungan 207, pengujian sample 27, benih sayuran 52, lainnya 26.




Gambar 6. Grafik Pemohon Berdasarkan Kategori Pengelompokkan

Pelaksanaan pengelolaan informasi

Pengumpulan dan pendokumentasian informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja; Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi; Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 2. Daftar Informasi Publik tahun 2023

		BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SAYURAN			Nomor	: 012023	
					Tanggal efektif	: 25 /01/2023	
		DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023			Tanggal revisi	: -	
No	Dokumen	Ringkasan Isi Informasi			Bentuk Informasi yang Tersedia		Klasifikasi Informasi (Kodefikasi)
		Jenis Informasi	Detail Informasi		Cetak	Online	
A	Profil						
		1	Alamat Kantor	Alamat BPSI Tanaman Sayuran, No. Telp. Website dan alamat email		√	BK
		2	Sejarah BPSI Tanaman Sayuran	Sejarah berdirinya BPSI Tanaman Sayuran		√	BK
		3	Profil BPSI Tanaman Sayuran	Visi, Misi, Tupoksi dan struktur organisasi		√	BK
		4	Profil Pejabat Struktural	Profil singkat Pejabat Struktural		√	BK
B	Program/Kegiatan						
		1	DIPA	Daftar isian penyelenggara anggaran: program dan kegiatan	√	√	BK
		2	RKA-KL (Rencana Kerja)	Daftar rincian rencana pelaksanaan anggaran kegiatan	√	√	BK
		3	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kontrak Kinerja BPSI Tanaman Sayuran dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	√	√	BK
		4	Rencana Kerja Tahunan	Rencana kerja BPSI Tanaman Sayuran	√	√	BK
		5	Rencana Strategis	Rencana strategis BPSI Tanaman Sayuran 2015-2019, dan 2020-2024	√	√	BK
C	Laporan						
		1	LAKIN/LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berisi realisasi anggaran, pencapaian perjanjian kinerja, kendala dan penyelesaiannya	√	√	BK

		2	Laporan Tahunan	Laporan kegiatan unit kerja selama satu tahun mencakup seluruh kegiatan dan kondisi di unit kerja	√	√	BK
		3	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman kerjasama lisensi, Magang, Penelitian dan delegasi legalitas	√	√	SS
		4	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Kelengkapan Pengadaan Barang dan Jasa	√		Dikecualikan
D	Keuangan						
		1	Laporan Keuangan	Laporan realisasi anggaran, Neraca, arus cas dan Catatan atas laporan keuangan	√	√	BK
		2	Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Laporan hasil kekayaan pejabat negara : LHKPN Sub Bagian Tata Usaha LHKPN PPK Penelitian Bendahara Penerima Pejabat Pengadaan	√	√	BK
E	Laporan Akses Informasi Publik						
		1	Laporan PPID	Rekap PPID Tahunan dan Bulanan	√	√	BK
		2	Tata cara permohonan informasi publik	Tata cara permohonan informasi publik	√	√	BK
		3	Laporan Pengaduan Masyarakat	Rekap pengaduan masyarakat	√	√	BK
		4	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Rekap indeks kepuasan masyarakat	√	√	BK
F	Peraturan						
		1	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 21/Permentan/OT.140/3/2013	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	√	√	SS
G	Informasi Tentang Organisasi						
		1	Tata cara permohonan informasi publik	Tata cara permohonan informasi publik	√	√	BK
		2	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	√	√	BK
		3	Pengadaan Barang dan Jasa	Informasi/pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	√	√	BK
H	Standar Prosedur						
		1	SOP Kegiatan Balai PATP	Standar Operasional Prosedur Balai PATP	√		SS
		2	Prosedur Pelayanan UPBS	Prosedur permohonan dan pembelian benih sayuran	√	√	BK

		3	Prosedur Pelayanan Jasa Penelitian	Prosedur permohonan informasi teknologi hasil penelitian	√	√	BK
		4	Prosedur Pelayanan Uji Laboratorium	Prosedur permohonan informasi dan pengujian laboratorium	√	√	BK
I	Statistik						
		1	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	√	√	SS
		2	Statistik Kepegawaian	Statistik Data Kepegawaian	√	√	SS
J	Informasi Serta Merta						
		1	Pandemi Covid	Panduan dan Peringatan terhadap bahaya covid 19		√	SM
		2	Prosedur Keadaan Darurat	Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat		√	SM
		3	Antisipasi serangan OPT	Pencegahan dan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Sayuran		√	SM
K	Kinerja						
		1	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Kelengkapan Pengadaan Barang dan Jasa	√		DK
		2	Dokumen Kerjasama Lisensi	Dokumen perjanjian kerjasama Lisensi antara Balitbangtan dan Perusahaan	√		DK

Keterangan :

- BK : Berkala
- SS : Setiap Saat
- SM : Serta Merta
- DK : Dikecualikan

Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai, menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID BPSI Tanaman Sayuran dalam menciptakan layanan yang inklusif bagi masyarakat. Melalui dukungan sarana dan prasarana, PPID BPSI Tanaman Sayuran dapat menyediakan berbagai alternatif jalur akses informasi publik yang diharapkan dapat menciptakan layanan informasi publik ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana tentunya disesuaikan dengan jalur layanan informasi publik yang disediakan. PPID BPSI Tanaman Sayuran menyediakan beberapa jalur layanan informasi publik yaitu melalui layanan tatap muka pada ruang layanan informasi publik. Laman permintaan informasi publik melalui portal PPID (<https://balitsa-litbang-ppid.pertanian.go.id/>) pada fitur silayan. Dengan demikian,

pemohon informasi publik dapat memilih jalur layanan informasi publik yang diinginkan sesuai kebutuhannya.

Layanan Tatap Muka Langsung

- a. Desk Pelayanan Informasi ini dilengkapi meja (2 unit), kursi (10 unit), telepon (1 unit), perangkat komputer (1 unit), dan kotak saran (kepuasan pelanggan).
- b. Tersedianya area dan sarana akses internet

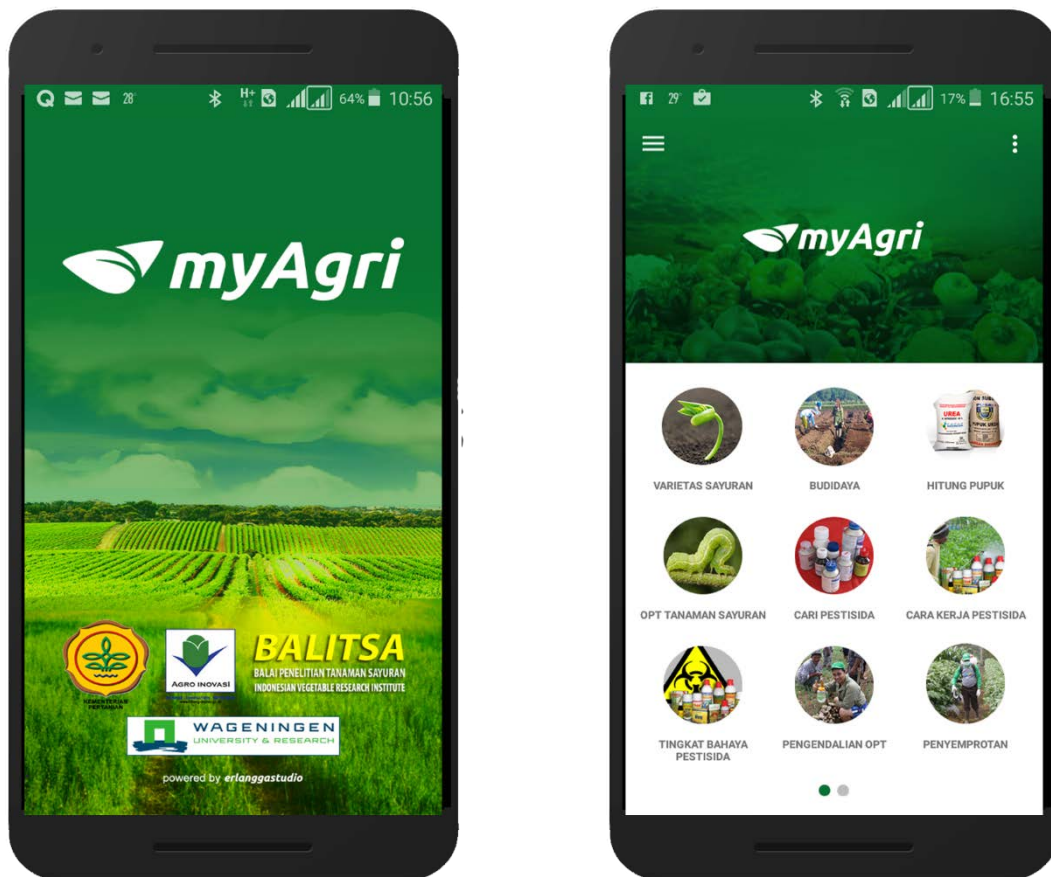


Gambar 8. Desk Layanan

Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik

Aplikasi My Agri adalah salah satu aplikasi smartphone dalam bidang pertanian yang dapat memudahkan petani dalam meningkatkan produksi tanaman sayuran dengan menggunakan konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) berbasis mobile learning. Aplikasi ini dirilis sejak 9 Agustus 2015 ini telah diunduh via Playstore per September 2023 oleh lebih dari 59.793 ribu petani sayuran di Indonesia dan beberapa negara.

Petani, penyuluh, dan pelaku usahatani tanaman sayuran yang selama ini mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai pemecahan masalah yang dihadapi, dengan mudah dapat mengakses informasi tersebut dengan aplikasi MyAgri. Beberapa Informasi yang dapat diperoleh dari aplikasi ini diantaranya tentang varietas unggul sayuran, budidaya tanaman sayuran, mengenal hama dan penyakit tanaman sayuran, pestisida untuk pengendalian HPT sayuran, informasi pasca panen dan pasar, juga terdapat fitur tanya jawab dengan pakar via WA.



Gambar 10. Aplikasi My Agri

Pada Tahun 2023 aplikasi My Agri mengikuti Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) yang diselenggarakan oleh Pemprov Jabar melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat. Dengan melewati beberapa tahapan dari bulan Juni - Oktober 2023. Diantaranya pembuatan proposal, seleksi administratif, penilaian proposal inovasi, Validasi/Verifikasi dan Observasi Lapangan dan Penghargaan KIJB Tahun 2023. Pada tanggal 3 Oktober 2023 aplikasi My Agri berhasil meraih juara 2 tingkat Kementerian Pengumuman lomba KIJB ini berlangsung di Hotel Papandayan, Bandung, My Agri mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Barat yang diserahkan secara langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah Jawa Barat.



Gambar 9. Penyerahan Penghargaan Aplikasi My Agri

PENUTUP

- a. Secara umum pelayanan informasi di lingkungan Balitsa dapat dilaksanakan dengan baik selama tahun 2023.
- b. Kesadaran akan pentingnya kegiatan layanan informasi di unit kerja semakin meningkat ditunjukkan dengan pemenuhan sarana dan prasarana ruang layanan informasi di setiap unit kerja.